

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan hal yang dapat meningkatkan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Menurut Sudirman (2018) pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Sebagai bentuk dalam perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja semakin meningkat, pendapatan semakin tinggi dan kesejahteraan masyarakat tercapai.

Dalam mencapai pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan yang wajib dilakukan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah (Firdhania & Muslihatinningsih, 2017). Peningkatan pertumbuhan ekonomi berarti menggambarkan bahwa perekonomian di wilayah tersebut berkembang dengan baik.

Perekonomian tidak terlepas dari timbulnya suatu masalah-masalah perekonomian. Salah satu permasalahan yang terus saja terjadi adalah masalah pengangguran. Menurut Amalia (2007:9) dalam Putri dan Subroto (2016) salah satu karakteristik umum negara berkembang adalah angka pengangguran

terbuka maupun terselubung yang tinggi. Masalah pengangguran di negara-negara berkembang adalah jauh lebih rumit dan lebih serius kalau dibandingkan dengan yang dihadapi di negara-negara maju (Sukirno, 2005).

Menurut Sukirno (2010) pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran.

Tingkat pengangguran yaitu perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu dan disajikan dalam bentuk persentase yang disebut sebagai tingkat pengangguran terbuka (TPT). Besarnya nilai TPT menunjukkan indikasi besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, pengangguran terbuka yaitu terdiri dari mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan serta mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Seperti seorang pelajar atau mahasiswa, mereka bukanlah seorang pengangguran terbuka karena masih dalam tahap belajar untuk mencari pekerjaan yang layak.

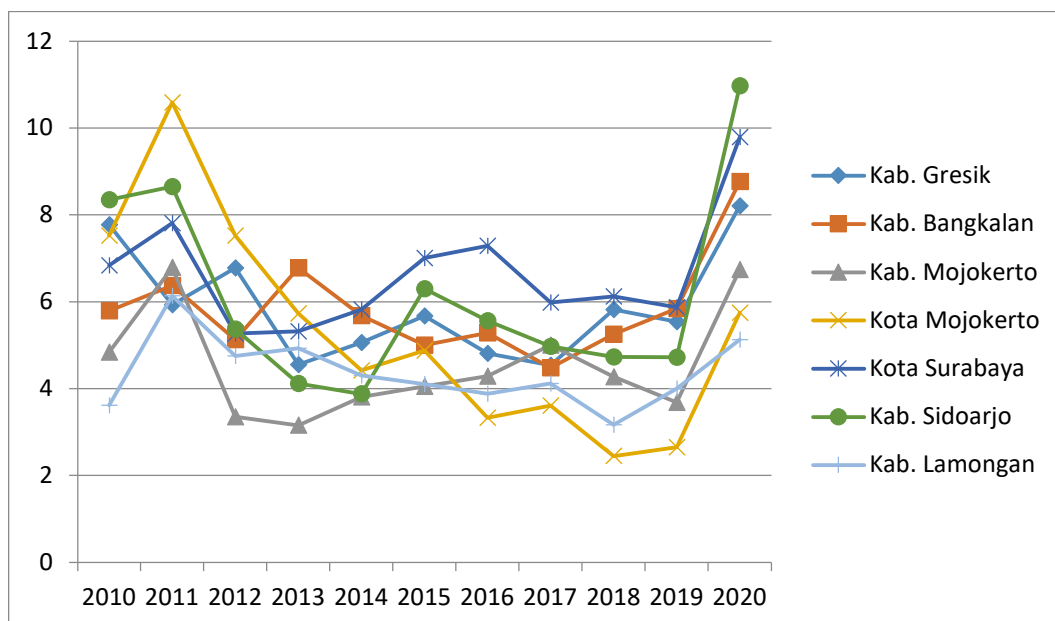
Kawasan Gerbangkertosusila yang selanjutnya disebut (GKS) adalah salah satu kawasan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kawasan ini merupakan salah satu hasil dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional

yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar daerah. Terdapat beberapa kabupaten/kota yang termasuk ke dalam kawasan Gerbangkertosusila antara lain; Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan.

Kawasan Gerbangkertosusila juga mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan. Hal itu tentu menjadi tantangan dan semangat tersendiri untuk pemerintah provinsi Jawa Timur agar segera mempercepat pembangunan ekonomi di kawasan tersebut.

Menurut Bab 1 Perpres Republik Nomor 80 Tahun 2019, "Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mewujudkan kualitas pembangunan yang berkelanjutan dengan meningkatnya kualitas hidup seluruh masyarakat di Provinsi Jawa Timur dan Nasional". Dengan itu maka kemungkinan besar masyarakat Jawa Timur akan menjadi lebih sejahtera.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pasal 87 poin a, dijelaskan bahwa Gerbangkertosusila merupakan satu-satunya kawasan strategis di Jawa Timur yang menjadi kawasan strategis nasional (KSN) dari sudut kepentingan ekonomi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kawasan ini berada dalam lingkup pengelolaan pemerintah pusat.

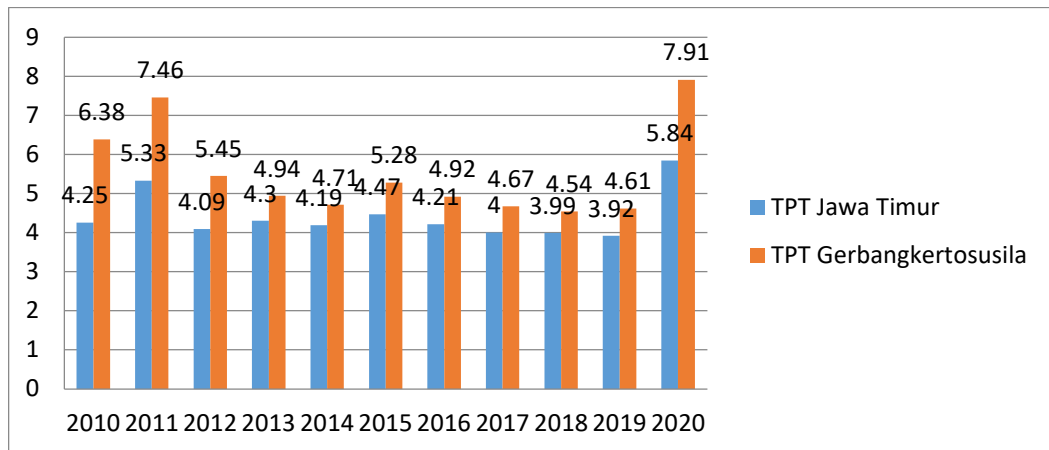


Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Kawasan Gerbangkertosusila Tahun 2010-2020 (%)

Sumber : Jawa Timur dalam Angka 2021, diolah

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di kawasan Gerbangkertosusila mengalami naik turun. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbesar terjadi di Kota Surabaya yaitu sebesar 5.87% dengan pengangguran sebesar 91.912 jiwa. Sedangkan tingkat pengangguran terkecil terjadi di Kota Mojokerto yaitu sebesar 2.65% dengan pengangguran sebesar 1.715 jiwa. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran meningkat drastis pada masing-masing wilayah.

Tingkat Pengangguran Terbuka di kawasan tersebut juga tidak merata dan perbedaannya sangat jauh. Kabupaten Mojokerto memiliki nilai Tingkat Pengangguran Terbuka sekitar 4-6% selama tahun 2010-2020, sangat berbeda jauh dengan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Surabaya yang mencapai 6-10% pada tahun 2010-2020.



Gambar 1.2 TPT Di Kawasan Gerbangkertosusila dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2020 (%)

Sumber : Badan Pusat Statistik (2021), diolah

Gambar 1.2 menjelaskan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur. Pengangguran di Kawasan Gerbangkertosusila pada tahun 2010 sebesar 6.38% sedangkan di Provinsi Jawa Timur hanya 4.25%. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran di Kawasan Gerbangkertosusila sebesar 7.91% dan lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 5.84%.

Di Indonesia ada beberapa wilayah yang termasuk ke dalam kawasan metropolitan. Terdapat empat kawasan metropolitan yang berada di pulau Jawa yaitu Kawasan Jabodetabekpunjur (Jakarta-Kab. Tangerang-Kota Tangerang-Kota Tangerang Selatan-Kota Bogor-Kota Depok-Kota Bekasi-Kab. Bogor-Kab. Bekasi-Kab. Cianjur), Kawasan Bandung Raya (Kota Bandung-Kota Cimahi-Kab. Bandung-Kab. Bandung Barat-Kab. Sumedang), Kawasan Kedungsepur (Kendal-Demak-Ungaran-Salatiga-Semarang-Purwodadi), dan Kawasan Gerbangkertosusila.

Selain itu terdapat tiga kawasan metropolitan yang berada di luar pulau Jawa antara lain adalah Kawasan Mamminasata (Makassar-Gowa-Maros-Takalar) yang berada di pulau Sulawesi, Kawasan Sarbagita (Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan) yang berada di pulau Bali, dan Kawasan Mebidangro (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo) yang berada di pulau Sumatra. Berikut adalah tabel perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka kawasan metropolitan di Indonesia berdasarkan tahun 2010.

Tabel 1.1 Perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka Kawasan Metropolitan di Indonesia Berdasarkan Tahun 2010 (%)

Kawasan Metropolitan	2010	2017	2018	2019	2020	Perubahan TPT (2020-2010)
Jabodetabekpunjur	11.58	8.82	8.30	7.82	11.12	-0.46
Mebidangro	8.83	5.73	6.05	5.38	7.68	-1.15
Mamminasata	9.59	7.13	6.77	6.03	8.2	-1.39
Bandung	11.52	7.45	7.39	7.50	11.04	-0.48
Kedungsepur	6.89	4.13	4.55	4.49	6.83	-0.06
Sarbagita	2.81	1.48	1.32	1.33	6.57	3.76
Gerbangkertosusila	6.38	4.67	4.54	4.61	7.91	1.53

Sumber : Badan Pusat Statistik (2021), diolah

Tabel 1.1 menunjukkan perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka kawasan metropolitan di Indonesia dengan tahun 2010 sebagai tahun dasar. Secara umum tingkat pengangguran masing-masing kawasan mengalami penurunan, hanya kawasan Sarbagita dan Gerbangkertosusila yang mengalami kenaikan. Perubahan tingkat pengangguran tertinggi berada di kawasan Mamminasata yaitu berkurang 1.39%.

Pada tahun 2020 Tingkat pengangguran Kawasan Gerbangkertosusila tidak lebih tinggi dari Kawasan Mebidangro dan Kedungsepur, tetapi penurunan tingkat pengangguran di kawasan tersebut lebih tinggi dibanding kawasan Gerbangkertosusila yang justru mengalami kenaikan sebesar 1.53%. Kawasan Jabodetabek dan Bandung yang mempunyai tingkat pengangguran lebih tinggi dari Kawasan Gerbangkertosusila justru mampu menurunkan tingkat pengangguran.

Pada tabel 1.1 dijelaskan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Kawasan Gerbangkertosusila hampir sama dengan Kawasan Kedungsepur, namun di Kawasan Kedungsepur mampu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0,06%. Hal tersebut tentu menjadi masalah bagi Kawasan Gerbangkertosusila karena belum mampu mengatasi masalah pengangguran di kawasan tersebut.

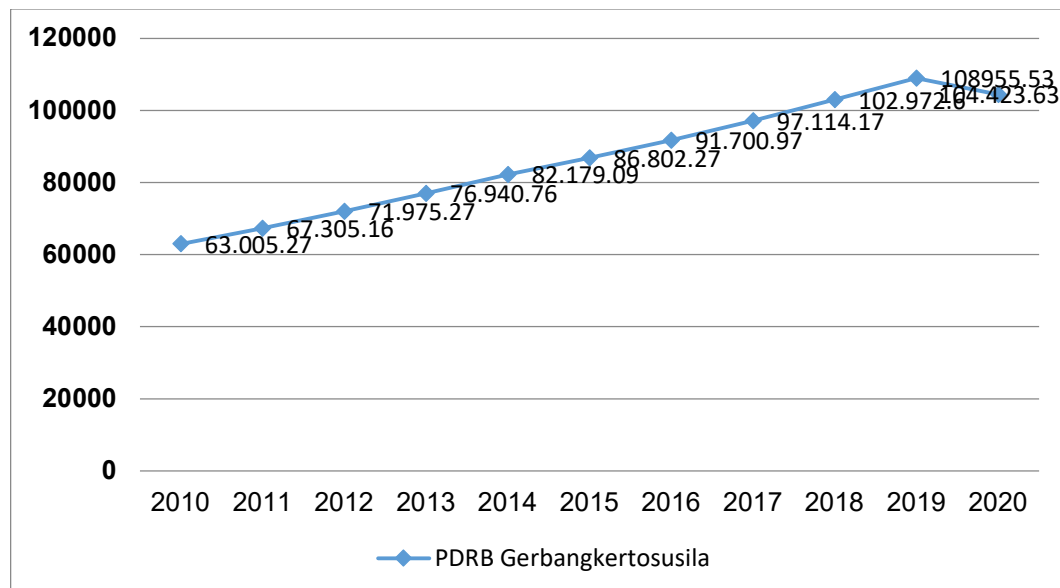
Berdasarkan dari tujuan pembentukan Kawasan Gerbangkertosusila yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar daerah, latar belakang di atas menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan masih belum tercapai karena tingkat pengangguran masih tinggi. Terdapat ketimpangan yang ditunjukkan dengan tingkat pengangguran yang masih meningkat di beberapa daerah.

Tidak hanya itu, secara umum perubahan tingkat pengangguran di Kawasan Gerbangkertosusila juga lebih rendah dibandingkan kawasan metropolitan lain di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila. Faktor-faktor yang dianalisis meliputi pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan

oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan tingkat pendidikan yang ditunjukkan dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).

Menurut Todaro & Smith (2008) dalam Setiawan (2010) laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun ditunjukkan melalui produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui peranan ekonomi di suatu wilayah tertentu.

Pada kenyataannya, PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB suatu wilayah meningkat, maka jumlah output dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat (Amrullah et al., 2019). Jumlah output yang meningkat akan menyebabkan permintaan tenaga kerja menjadi meningkat. Sehingga tingkat pengangguran akan menurun.



Gambar 1.3

PDRB Kawasan Gerbangkertosusila Tahun 2010-2020 (Miliar rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistik (2021), diolah

Gambar 1.3 menunjukkan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan di Kawasan Gerbangkertosusila tahun 2010-2020. Dilihat dari gambar tersebut, pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga konstan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Seharusnya kenaikan PDRB juga didukung oleh berkurangnya tingkat pengangguran di kawasan tersebut karena permintaan tenaga kerja lebih banyak. Namun, tingkat pengangguran di Kawasan Gerbangkertosusila justru mengalami naik turun, hal itu menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB tidak diimbangi dengan penurunan pengangguran.

Studi yang dilakukan oleh ekonom Arthur Okun (1962) mengindikasikan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. Penelitian tersebut kemudian dikenal dengan Hukum Okun yang menjelaskan bahwa tingkat pengangguran memiliki hubungan negatif dengan GDP riil (Iswanto, 2013).

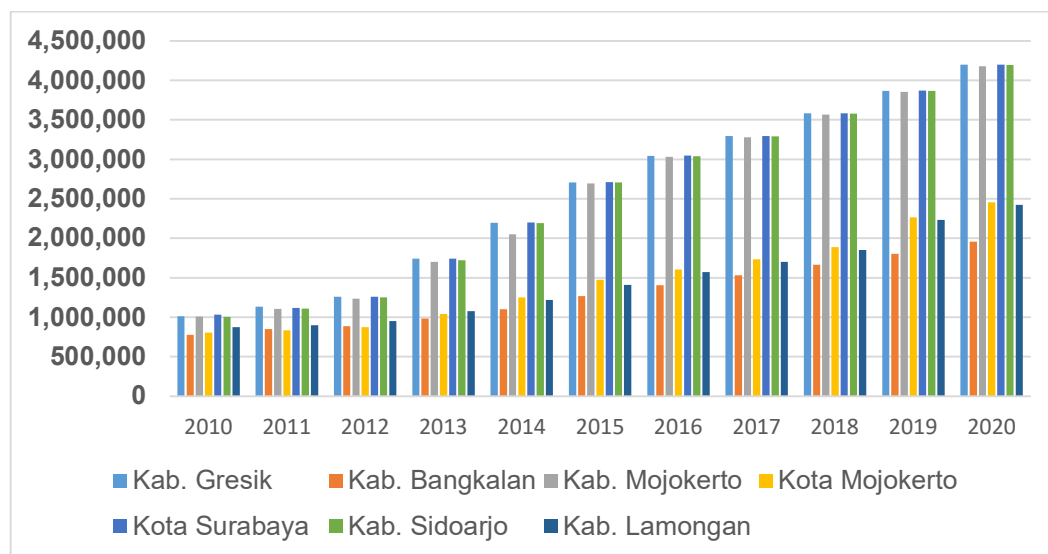
Ketika pertumbuhan ekonomi naik maka pengangguran turun hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang naik disebabkan oleh banyaknya lapangan pekerjaan yang dapat diserap baik oleh tenaga kerja yang tersedia. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Muminin & R. Wahyu (2017) yang memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Namun hasil berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunani, dkk (2017) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.

Upah adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Menurut Sukirno (2008), jika tingkat upah naik akan berhubungan pada

penurunan tingkat pengangguran pula. Penelitian yang dilakukan oleh (Yarlina Yacoub & Maulidiah Firdayanti, 2019; Fitri Junaidi, 2016; Jihad Lukis & Daryono, 2014) yang menyatakan bahwa pengaruh upah minimum menunjukkan pengaruh yang signifikan dan berdampak positif terhadap pengangguran. Namun ada juga penelitian yang berbeda. Penelitian Sulistiawati (2012) menyimpulkan bahwa upah berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap tingkat pengangguran.

Hubungan negatif bermakna bahwa pengaruh upah terhadap tingkat pengangguran tidak searah, artinya apabila terjadi kenaikan upah, maka dapat berpotensi untuk menurunkan tingkat pengangguran. Penelitian ini sama seperti penelitian yang dilakukan oleh (Dian Priastiwi & Herniwati Retno, 2019) yang menyimpulkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap pengangguran.

Secara umum dari tahun ke tahun Upah Minimum Kabupaten/Kota di Kawasan Gerbangkertosusila terus mengalami peningkatan, namun hal itu juga tidak diimbangi dengan berkurangnya tingkat pengangguran. Ketidakseimbangan kenaikan upah yang tidak mengurangi tingkat pengangguran menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi. Upah Minimum Kabupaten/Kota di Kawasan Gerbangkertosusila ditunjukkan dengan gambar 1.4 berikut:



Gambar 1.4 Upah Minimum Kabupaten/Kota Kawasan Gerbangkertosusila Tahun 2010-2020 (rupiah)

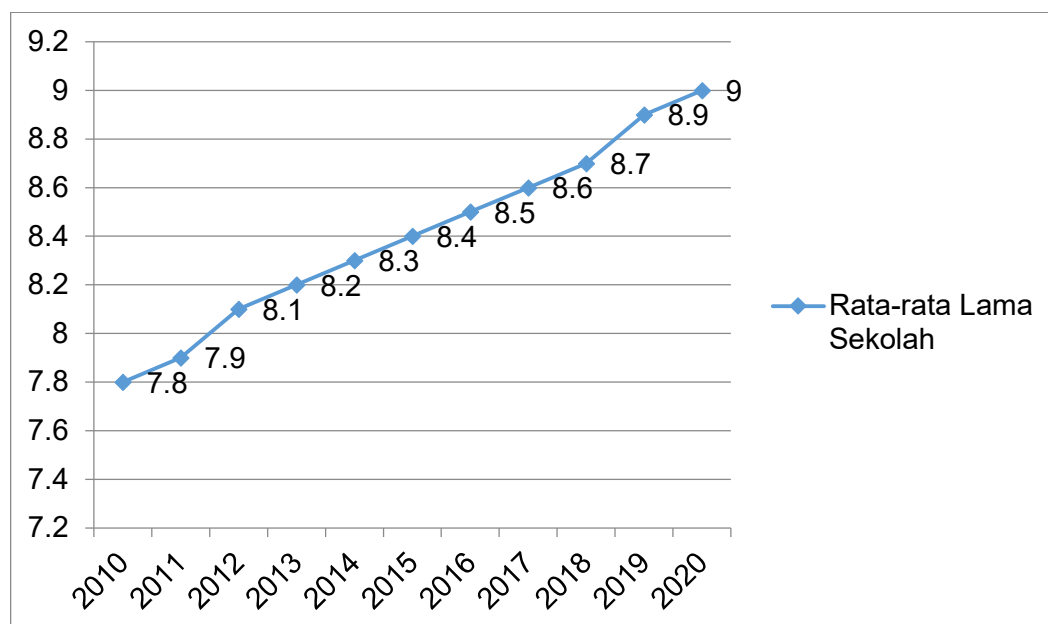
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota di Kawasan Gerbangkertosusila dari tahun 2010-2020 terus mengalami peningkatan. Upah minimum tertinggi pada tahun 2019 berada di Kota Surabaya yaitu sebesar Rp3.871.052, sedangkan upah terendah berada di Kabupaten Bangkalan yaitu Rp1.801.406. Pada tahun 2020 upah di Kota Surabaya tetap menjadi yang paling tinggi yaitu Rp4.200.479 dan Kabupaten Bangkalan tetap memiliki upah minimum yang rendah yaitu Rp1.954.705.

Suadiah dan Cahyono (2013) menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jombang menyatakan bahwa ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran. Variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat pengangguran akan bertambah.

Hasil penelitian berbeda dengan yang dilakukan oleh Priastiwi & Handayani (2019) dan Roring, dkk (2020) yang menyimpulkan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan dengan pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat pengangguran akan berkurang.

Pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 pasal 1 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Berikut adalah gambar Rata-Rata Lama Sekolah di Kawasan gerbangkertosusila tahun 2010-2020.



Gambar 1.5 Rata-Rata Lama Sekolah Kawasan Gerbangkertosusila Tahun 2010-2020 (Tahun)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021), diolah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila. Peneliti ingin menjadikan penelitian ini sebagai bahan skripsi dengan judul "Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Dan Rata-rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila Tahun 2010-2020".

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi adalah untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Pengangguran merupakan salah satu indikator pengukur prestasi kegiatan ekonomi untuk menentukan tingkat kemakmuran suatu masyarakat. Tingkat pengangguran yang meningkat menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan antar daerah di Kawasan Gerbangkertosusila belum tercapai.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Kawasan Gerbangkertosusila. Variabel dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka, PDRB, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Rata-Rata Lama Sekolah. Oleh karena itu, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila?
3. Bagaimana pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila.
2. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila.
3. Untuk menganalisis pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk Akademisi, agar memberikan sumbangan pemikiran bagi akademisi dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan terutama dalam ilmu perencanaan pembangunan.
2. Untuk praktisi, sebagai referensi bagi pihak dinas tenaga kerja dan transmigrasi dengan memberikan informasi tentang beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila.
3. Untuk umum, memberikan informasi kepada masyarakat umum agar berguna sebagai tambahan pengetahuan atau pembandingan bagi pihak yang ingin melakukan penelitian yang sama.